

Papua Barat: Akses PBB Pertanyaan

14:48:00

Ditanyakan oleh

Lord Harries dari Pentregarth - (Perlemen)

Untuk menanyakan kepada Pemerintah Yang Mulia, kemajuan apa yang telah dicapai dalam memperoleh akses ke Papua Barat untuk Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menteri Negara, Luar Negeri, Persemakmuran dan Kantor Pembangunan (Lord Ahmad dari Wimbledon) (Con)

Yang Mulia, Inggris menyambut baik keterlibatan baru-baru ini antara Indonesia dan PBB, sebagai bagian dari tinjauan berkala universal Indonesia pada bulan November 2022. Kami terus mendukung kunjungan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke wilayah Papua. Kami menyadari bahwa sejumlah besar waktu telah berlalu sejak kunjungan tersebut pertama kali diusulkan, tetapi kami berharap kedua belah pihak dapat segera menyepakati tanggal kunjungan.

Lord Harries dari Pentregarth (CB) - (Perlemen)

Saya berterima kasih kepada Menteri atas jawabannya. Beliau menyinggung tentang peninjauan berkala universal terhadap Indonesia. Beliau pasti tahu bahwa pada saat peninjauan tersebut, sejumlah negara besar, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, menyerukan agar PBB melakukan intervensi di Indonesia dan segera mengunjungi Indonesia dan melakukan kunjungan oleh Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Sama sekali tidak jelas apakah Inggris termasuk di antara mereka yang mendukung seruan tersebut. Mungkin Bapak Menteri dapat memberikan pencerahan kepada kami.

Lord Ahmad dari Wimbledon (Con)

Saya harap jawaban yang saya berikan di DPR hari ini dapat meyakinkan Yang Mulia dan Yang Terhormat bahwa kami mendukung kunjungan awal. Saya menyadari bahwa kunjungan ini pertama kali diusulkan di bawah Komisaris Tinggi Zeid, yang kemudian digantikan oleh Komisaris Tinggi Bachelet dan kemudian oleh Komisaris Tinggi Türk. Kunjungan ini sudah lama tertunda, dan penting untuk dilaksanakan secepatnya.

Lord Lexden (Con) - (Perlemen)

Tidakkah jelas bahwa negara kecil ini sangat menderita di bawah penindas kolonial, Indonesia, yang sibuk mengeksploitasi sumber daya mineral yang kaya dan hutan yang luas di negara ini untuk kepentingannya sendiri? Akankah Pemerintah melakukan segala upaya, bersama dengan mitra-mitra Persemakmuran di kawasan ini, untuk membuat PBB bertindak dan bertindak tegas?

Lord Ahmad dari Wimbledon (Con)

Yang Mulia, yang penting adalah kita menyoroti isu-isu hak asasi manusia ketika mereka muncul, seperti yang kita lakukan dengan mitra-mitra utama. Pada akhirnya, saya setuju dengan teman saya yang mulia bahwa kita membutuhkan PBB, dan langkah selanjutnya adalah sangat penting bagi Komisaris Tinggi untuk melakukan kunjungan penting ini.

Lord Kennedy dari Southwark (Lab Co-op) - (Perlemen)

Yang Mulia, sudah lebih dari satu tahun sejak laporan pelapor khusus PBB mengenai tuduhan pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan pemindahan paksa ribuan penduduk asli Papua. Apakah Menteri, rekan-rekan menternya, atau duta besar kami di Jakarta telah menyampaikan pernyataan kepada rekan-rekan mereka di Indonesia tentang isi laporan tersebut?

Lord Ahmad dari Wimbledon (Con)

Yang Mulia, saya pastikan kepada Yang Mulia bahwa kami melakukan pendekatan dengan mereka secara teratur. Baru-baru ini kami mendapat kunjungan dari tim kami di Papua. Kami menggunakan keterlibatan bilateral kami, yang sangat kuat dengan Pemerintah Indonesia, untuk mengangkat isu-isu, termasuk situasi di Papua dan berbagai masalah hak asasi manusia yang lebih luas.

Lord Hannay dari Chiswick (CB) - (Perlemen)

Yang Mulia, bisakah Menteri menjelaskan lebih jauh mengapa Inggris tampaknya tidak menjadi bagian dari kelompok delapan negara yang mendesak kunjungan awal Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia?

Tentu saja masuk akal untuk meminta negara demokratis seperti Indonesia untuk menerima Komisaris Tinggi untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia. Itulah yang seharusnya dilakukan, dan saya harap kita akan menekannya dengan kuat.

Lord Ahmad dari Wimbledon (Con)

Yang Mulia, itulah yang sedang kami lakukan. Seperti yang saya tunjukkan dalam salah satu tanggapan saya sebelumnya, kunjungan ini pertama kali diusulkan pada tahun 2018; Saya ingat pernah berbicara tentang hal itu dengan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia saat itu. Penting bahwa kunjungan semacam itu terus berlanjut, dan saya meyakinkan Yang Mulia tentang dukungan penuh kami untuk itu.

Lord Purvis of Tweed (LD) - (Perlemen)

Yang Mulia, masalah hak asasi manusia disoroti dengan tepat oleh laporan hak asasi manusia Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan yang diterbitkan pada musim gugur tahun lalu untuk tahun 2021. Laporan tersebut secara khusus menyoroti kebijakan Pemerintah Inggris untuk mengupayakan pembangunan yang merata dan adil di Papua dan Papua Barat. Namun, dalam peta jalan kemitraan strategis Pemerintah Inggris untuk Indonesia yang diterbitkan tahun lalu, hanya ada referensi tentang terorisme di Papua dan tidak ada referensi tentang pembangunan yang adil atau hak asasi manusia. Apa gunanya Kementerian Luar Negeri menyoroti masalah hak asasi manusia jika tidak melakukan apa-apa dalam negosiasi dengan negara yang bersangkutan?

Lord Ahmad dari Wimbledon (Con)

Yang Mulia, Yang Mulia memahami pentingnya laporan hak asasi manusia, yang saya sangat bangga bahwa Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan terus memproduksi. Laporan ini tidak hanya berfokus pada negara-negara dengan catatan terburuk dalam hal hak asasi manusia. Yang terpenting, kondisi dalam laporan tersebut adalah di mana kita dapat memberikan pengaruh. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, Indonesia adalah mitra bilateral dan regional yang penting dimana kami terlibat secara luas dalam berbagai isu perdamaian, konflik dan stabilitas di dalam dan di seluruh kawasan; Indonesia adalah mitra kunci. Dalam semua pertemuan kami, kami mengangkat hak asasi

manusia dalam berbagai isu, dan kami melihat beberapa kemajuan di Indonesia, termasuk dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan.